

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

SKRIPSI

Oleh :

**DEWI RATNASARI
NIM 105730518915**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

SKRIPSI

Oleh :

**DEWI RATNASARI
NIM 105730518915**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, saudara-saudaraku serta keluarga dan orang-orang yang kusayangi lainnya yang selalu mendoakanku dan menyemangatiku dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng"
Nama Mahasiswa : Dewi Ratnasari
No Stambuk/NIM : 105730518915
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan
Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di
Ruang IC 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

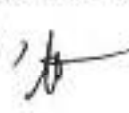

Amir, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN: 0031126404


Samsuddin, S.Pd., M.Ak
NIDN: 0909107902

Mengetahui:



Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Ismail Badolahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NIDN: 197342



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra LL7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama DEWI RATNASARI , NIM : 105730518915, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :130/ Tahun 1440 H/ 2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dhu al-Hijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Universitas Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji
 1. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak, CA, CSP (.....)
 2. Dr. Ansvarif, SE., M.Si., Ak (.....)
 3. Salam, SE., M.Si., Ak, CA (.....)
 4. Samsul Rizal, SE., MM (.....)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Ratnasri

Stambuk : 105730518915

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng"

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang membuat Pernyataan,




Dewi Ratnasari

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unisma, Makassar

Ketua,
Jurusan Akuntansi




Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NEM: 1973428

ABSTRAK

Dewi Ratnasari, Tahun 2019. Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing: Bapak Amir dan Bapak Syamsuddin)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan *internet research*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Belum maksimal dalam menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis AkruaI dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Hal tersebut terkait dengan sistem pencatatan transaksi masih ada beberapa transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan tanggal kejadiannya.

Kata kunci: Sistem Akuntansi, Keuangan Daerah



ABSTRACT

DewiRatnasari, 2019. *Analysis of the Regional Financial Accounting System at the Regional Financial Management Agency of Bantaeng Regency, Skripsi of the Accounting Study Program at the Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by the Supervisor: Mr. Amir and Mr. Syamsuddin)*

This study aims to determine the Regional Financial Accounting System at the Regional Financial Management Agency of Bantaeng Regency. This type of research used in research is a case study research with a descriptive approach. In collecting the data using interview techniques, documentation studies and internet research. Data collection in this study was carried out by going directly to the research location. The results showed that the Regional Financial Management Agency of Bantaeng Regency was not maximal in applying the accounting system in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Accounting Standards and Permendagri Number 64 of 2013 concerning Application of Accrual-Based Government Accounting Standards to Regional Governments. This is related to the transaction recording system. There are still a number of transactions that are not recorded in accordance with the date of the incident.

Keywords: Accounting System, Regional Finance



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng” dapat terselesaikan.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Secara khusus ucapan sayang dan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis bapak Rajuddin dan ibu Hasmawati yang tak pernah berhenti memberikan doa, harapan, restu, semangat, cinta dan kasih sayang yang begitu tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang selalu mendukung dan memberi perhatian penuh dan selalu memberikan semangat hingga penulis bisa sampai ditahap ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis sejak awal proses penyusunan skripsi dan mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd.Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si.Ak.CA.CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Amir, SE.,M.Si.Ak.CA selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini
5. Bapak Syamsuddin, S.Pd.,M.Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini
6. Bapak dan Ibu dosen, serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang banyak membantu dan memberikan ilmu yang tak terhingga kepada penulis selama menempuh studi
7. Orang-orang tersayang Astian Dwi Putra, Anggi Suyudi Saputra, Ilmawati Anwar, Roslindah, Riska, Fitrah Ramdhani, Wahyu Nusantara Putra, Iskandar B, Kahar Asro Pambudi, dan Ilham yang selalu memberikan doa, semangat, dan bantuannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2015 khususnya Ak.15A yang selalu belajar bersama, berbagi dan menciptakan kenangan selama masa perkuliahan.
9. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudahan-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikumWr.Wb

Makassar, 24 Agustus 2019

Penulis

Dewi Ratnasari



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
B. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Permendagri No.64 Tahun 2013	10
C. Penyajian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	11
D. Tinjauan Empiris	25
E. Kerangka Konsep	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian	29
B. Focus Penelitian.....	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
D. Sumber Data	30
E. Pengumpulan Data.....	30
F. Instrument Penelitian.....	30
G. Metode Analisis.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	32
B. Kebijakan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BPKD	52
C. Metode Pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada ★ BPKD	54
D. Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.	25
Tabel 4.1 58	58
Tabel 4.2. 59	59
Tabel 4.3. 61	61
Tabel 4.4 63	63



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.....	13
Gambar 2.2.....	17
Gambar2.3.....	22
Gambar 2.4.....	28
Gambar 4.1.....	51
Gambar 4.2.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32, mengamanatkan tentang perlunya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sebagai turunan dari peraturan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dengan adanya peraturan tersebut, maka dasar pencatatan akuntansi pemerintahan berubah dari basis kas kepada basis kas menuju (*toward*) akrual dan kepada basis akrual penuh.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menetapkan peraturan kepala daerah tentang "Kebijakan Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah yang berpedoman pada SAP". Kebijakan akuntansi tersebut merupakan pedoman bagi pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, kebijakan ini juga seyogyanya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim

anggaran pemerintah daerah. Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak. Dalam pembahasannya, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diimplementasikan.

Praktik selama ini menunjukkan banyak kebijakan akuntansi disusun dengan menuliskan kembali hampir seluruh isi SAP. Hal tersebut menimbulkan inefisiensi karena adanya pengulangan (*redundancy*) antara SAP yang diatur oleh peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah dapat mengambil unsur-unsur pokok dari SAP, lalu mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode. Baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun kebijakan akuntansi paling lambat tahun 2014.

Awal tahun 2014 dapat dikatakan sebagai awal tahun penerapan akuntansi pemerintah daerah berbasis akruwal, yaitu berupa perancangan tahun pembangunan kebijakan akuntansi, bagan akun akuntansi, sistem akuntansi tiap pemerintah daerah. Pada tahun tersebut merupakan tahun uji coba proses akuntansi akruwal pada tiap pemerintah daerah. Peraturan menteri tersebut memberi fasilitas berupa pedoman akuntansi (sesuai pasal 2 Permendagri tersebut) untuk keperluan penerapan SAP Berbasis Akruwal

pada Pemerintah Daerah yang mencakupi panduan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, panduan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar (BAS). Peraturan tersebut mengandung implikasi praktis operasional pada tataran pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan kebijakan akuntansi di daerah adalah murni kewenangan daerah dimana kepala daerah adalah pemutus persetujuan produk hukum berupa peraturan daerah yang telah melewati prosedur berupa koneksi hingga akhirnya diparaf oleh pejabat berwenang dan mendapat persetujuan oleh kepala daerah. Selanjutnya dilimpahkan kebagian terkait untuk dilaksanakan kebijakan akuntansi tersebut yang berupa prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah berisi unsur-unsur pokok dari standar akuntansi pemerintahan yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi merupakan pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD.

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan dibidang keuangan dan aset daerah dan tugas pembantuan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bantaeng merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah berperan penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kabupaten Bantaeng dan dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardi Rahmawan (2012) mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah telah dirasa cukup oleh para pengguna dan telah menyajikan informasi keuangan, laporan keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara Widyastuti (2015) mengatakan bahwa Kesiapan Pemerintah Kabupaten Gianyar dilihat dari kualitas SDM belum sepenuhnya menguasai basis akrual dan masih dibutuhkan pelatihan-pelatihan. Kesiapan dari segi sistem informasi akuntansi sudah menyiapkan software dan hardware yang mendukung SAP berbasis akrual dan kesiapan dari segi komitmen organisasi ialah pemerintah telah mendukung namun lebih meningkatkan koordinasi kepada SKPD lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan meneliti penerapan sistem akuntansi pada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bantaeng. Pemilihan objek penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa Dinas

Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah mengelola penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat secara lengkap digambarkan sistem Akuntansi SKPD.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pernyataan “Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng”.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Bantaeng.

2. Secara Akademik, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan sistem akuntansi di daerah.
3. Menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan dengan fokus yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian Sistem

Pada dasarnya kata sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang berarti kebersamaan, yaitu keseluruhan dari bagian-bagian yang memiliki hubungan satu sama lain. Berikut pendapat para ahli yang mengemukakan mengenai sistem;

Menurut Hall (3013) Sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau sub sistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Dan menurut Mulyadi (2016) Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem adalah keseluruhan dari elemen-elemen yang memiliki hubungan satu sama lain, elemen-elemen tersebut memiliki fungsi masing-masing yang didalamnya terdapat prosedur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pengoperasian barang dan data.

b. Pengertian Akuntansi

Dalam pengetahuan akuntansi dikenal dua istilah asing, yaitu *accountancy* dan *accounting*. Secara etimologi istilah tersebut lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Akuntansi*. Untuk mendekatkan pengertian terhadap kedua istilah tersebut, perlu diketahui pengertian dan kedudukan masing-masing dalam pengetahuan akuntansi.

Accountancy merupakan suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi apapun bentuknya, yang terbagi atas dua bagian. Pertama, *accounting* ialah pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam arti yang luas. Kedua, auditing ialah pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan penilaian (evaluasi) atas proses pelaksanaan pembukuan tersebut. Oleh karena itu, istilah *Accountancy* lebih luas meliputi baik bidang teori, proses pembukuan, penerapan atau praktik, maupun pemeriksaan dan penilaian. Sementara itu, istilah *Accounting* hanya menunjukkan bidang teori.

Akuntansi sering dijuluki sebagai bahasa bisnis (the language of business). Perubahan yang cepat dalam masyarakat telah menyebabkan semakin kompleksnya bahasa tersebut, yang digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasi data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah dan anggota masyarakat lainnya.

Menurut definisi dari American Accounting Association (AAA) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.

Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA), Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

c. Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah yang disetujui dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut; Keuangan Daerah adalah semua hak dan pembayaran daerah yang dapat disetujui dengan uang dan segala sesuatu menjadi uang dan barang yang biasa dibuat menjadi milik daerah, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sementara dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dinyatakan sebagai; Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat mendukung dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk harta yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

B. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Menurut Permendagri No.64 Tahun 2013

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

Untuk menyusun SAPD perlu memperhatikan beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Identifikasi Prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan pihak-pihak terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

3. Menentukan dokumen terkait

Setelah prosedur dan pihak yang terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang *valid* untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

4. Menentukan jurnal standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

5. Menuangkannya dalam langkah teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

C. Penyajian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 untuk memberikan gambaran bentuk penyajian sistem akuntansi pemerintah daerah, dibawah ini diuraikan mengenai sistem akuntansi PPKD dan sistem

akuntansi SKPD yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

1. Sistem Akuntansi PPKD

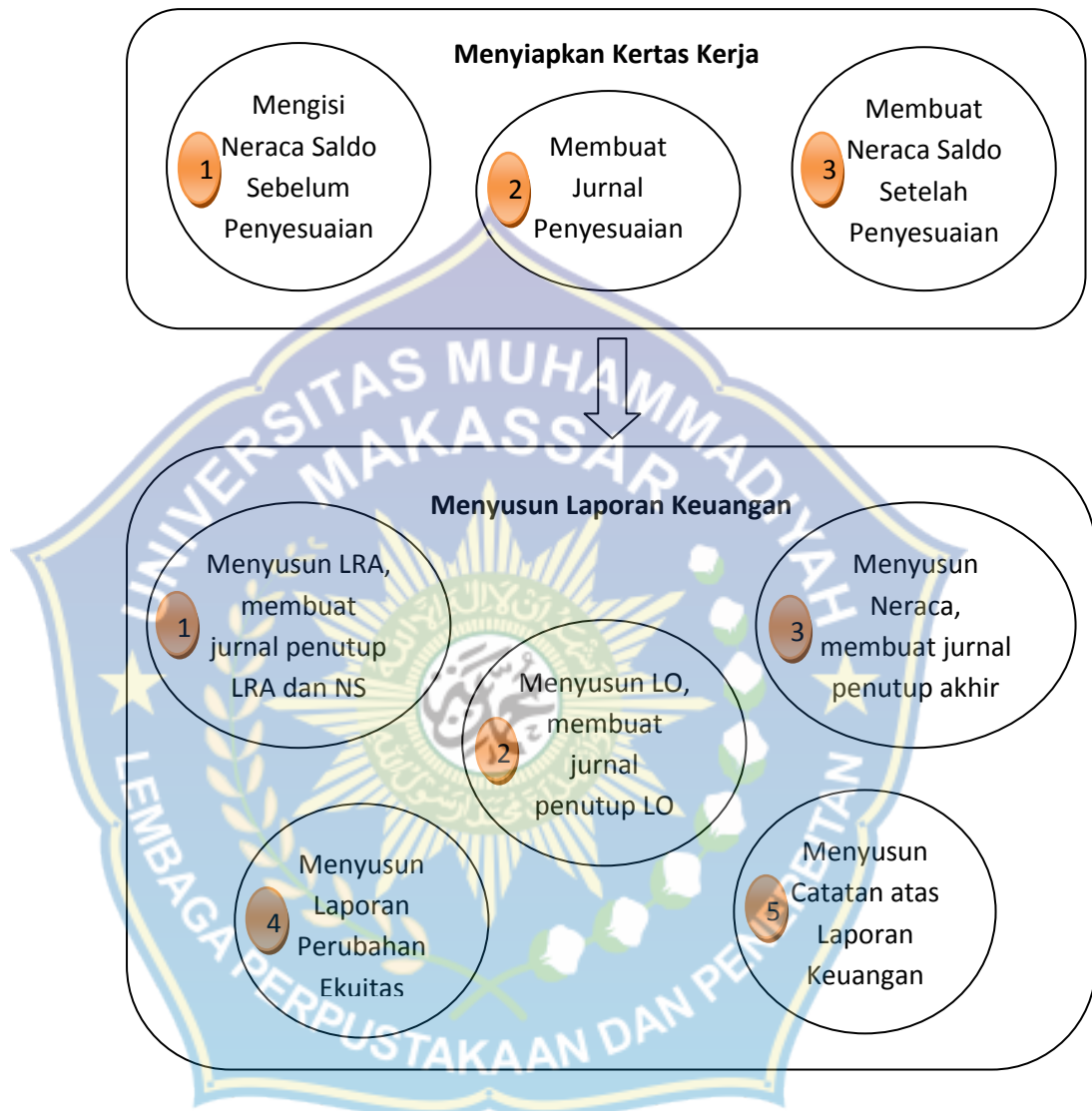
a. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh fungsi Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat 5 laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Laporan Operasional (LO)
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berikut gambar bagan beserta penjelasan mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan PPKD:



Sumber: Lampiran II_Permendagri 64 Tahun 2013

Gambar 2.1

1) Menyiapkan Kertas Kerja

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Adapun langkah-langkah dalam menyiapkan kertas kerja sebagai berikut;

a) Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja

b) Membuat Jurnal Penyesuaian

Fungsi Akuntansi PPKD Membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

c) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja

2) Menyusun Laporan Keuangan

- a) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam "Laporan Realisasi Anggaran"

- b) Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penetapan LO.

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

- c) Menyusun Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, fungsi Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit-LO ke akun Ekuitas.

- d) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat

sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

e) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

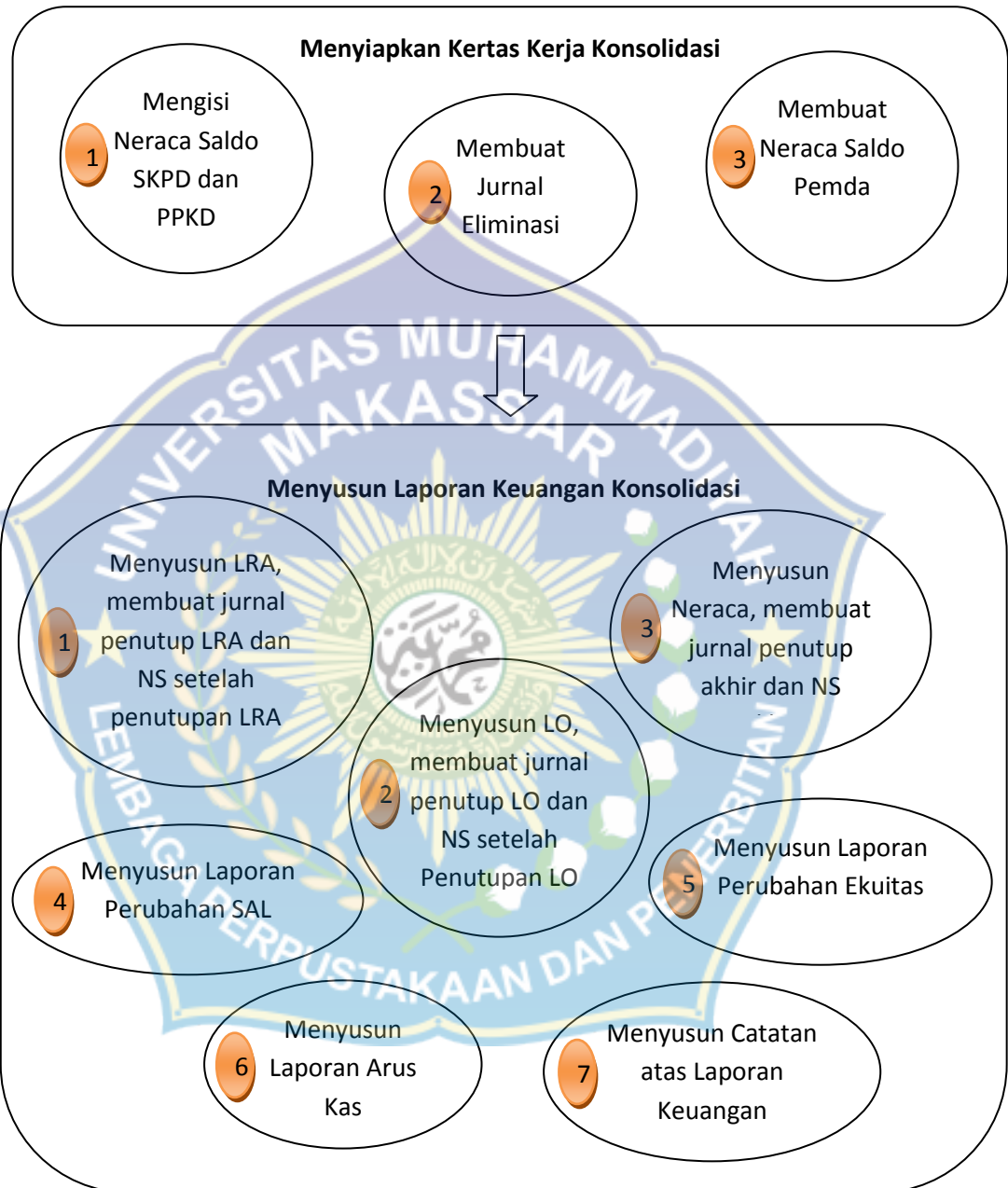
b. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat 7 laporan keuangan PPKD, yaitu;

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berikut gambar bagan beserta penjelasan mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian PPKD:



Sumber: Lampiran II_Permendagri 64 Tahun 2013

Gambar 2.2

1) Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan PPKD. kertas kerja ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menyiapkan kolom neraca saldo pemerintah daerah dalam kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD yang dimasukkan kedalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan. Setelah memasukkan semua neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Berdasarkan neraca saldo SKPD dan PPKD serta Jurnal Eliminasi, fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah. Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi akuntansi PPKD mencatat "RK-PPKD" di debit dan "RK-SKPD" di kredit.

2) Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

a) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo Setelah Penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk

dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- b) Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

- c) Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit-LO ke akun Ekuitas.

- d) Menyusun Laporan Perubahan SAL

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, fungsi akuntansi PPKD dapat menyusun Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

- e) Membuat Laporan Arus Kas

Selanjutnya, fungsi akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

f) Membuat Laporan Arus Kas

Laporan Arus kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsure dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan jugajurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait arus kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.

g) Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2. Sistem Akuntansi SKPD

Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.

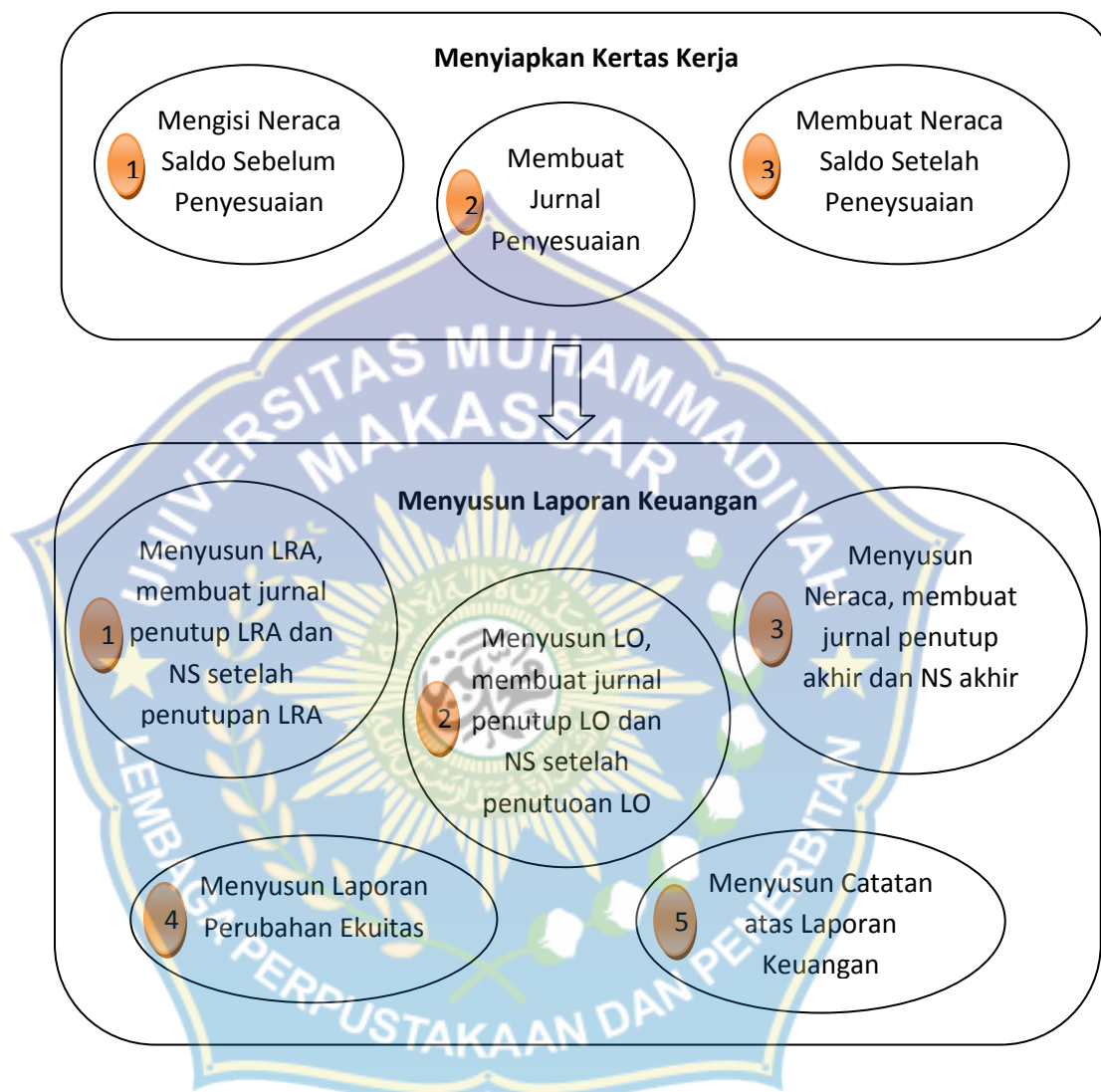
Laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan *posting* yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dari 7 laporan keuangan wajib yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang standar akuntansi pemerintah, terdapat 5 laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu;

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)



Berikut gambar bagan beserta penjelasan mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD:



Sumber: Lampiran II_Permendagri 64 Tahun 2013

Gambar 2.3

1) Menyiapkan Kertas kerja

PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual

a) Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada kertas kerja.

b) Membuat jurnal penyesuaian

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada kertas kerja.

c) Membuat Neraca Saldo setelah penyesuaian

PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom Neraca Saldo Setelah penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja.

2) Menyusun Laporan Keuangan

- a) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- b) Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian disajikan dalam Laporan Operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai-nilai akun LO menjadi 0. Kemudian, setelah jurnal penutupan, akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah penutupan LO.

- c) Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah penutupan LO, Akuntansi SKPD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit)–LO ke akun ekuitas. Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, akuntansi SKPD

menyusun Neraca Saldo Akhir, Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi selanjutnya.

d) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data ekuitas awal dan perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

e) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

D. Tinjauan Empiris

Penelitian ini merupakan penelitian untuk melihat Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, adapun hasil dari penelitian sebelumnya yaitu;

Tabel 2.1

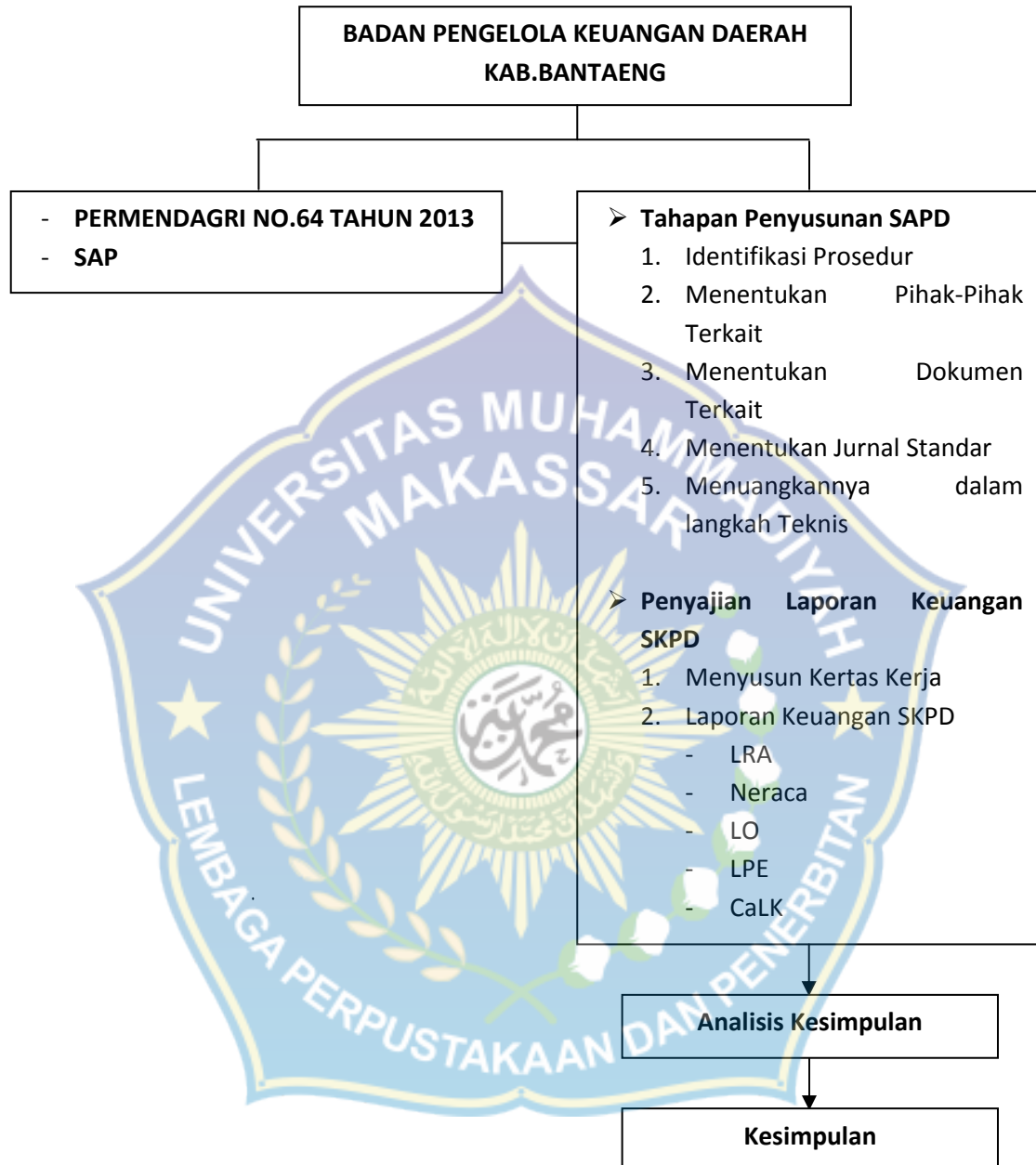
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Variable Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ardi Rahmawan (2012) kajian penggunaan Informasi Daerah	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Kualitatif Deskriptif	Para pengguna informasi keuangan, laporan keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan

				yang berlaku, terutama peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah
2.	Kadek Desiana (2014) pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	Kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan	Metode kuantitatif	Kompotensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. kedua, penerpa standar akuntansipemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. ketiga, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3.	Nurhayati Soleha (2014) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan (studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Banten)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kegiatan pengendalian, Analisis jalur SKPD	Metode Kuantitatif	Mengemukakan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan.
4.	Dahri Adi (2015) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode Kuantitatif	Nilai rs 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$. serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya. selain itu hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya 25.6% kualitas laporan keuangan

				pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. dengan kata lain bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5.	Dewi Andini (2015) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Daerah.	Metode Kuantitatif	Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD kabupaten empat lawing
6.	Widyastuti dkk (2015) Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Di Kabupaten Gianyar.	Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	Metode Kualitatif Interpretif	Kesiapan Pemerintah Kabupaten Gianyar dilihat dari kualitas SDM belum sepenuhnya menguasai basis akrual dan masih dibutuhkan pelatihan-pelatihan. Kesiapan dari segi sistem informasi akuntansi sudah menyiapkan software dan hardware yang mendukung SAP berbasis akrual dan kesiapan dari segi komitmen organisasi ialah pemerintah telah mendukung namun lebih meningkatkan koordinasi kepada SKPD lainnya.

E. Kerangka Konsep



Gambar 2.4

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan fokus kepada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan penerapannya pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantaeng.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng, yang berada di Jl. Andi Mannappiang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama dua bulan

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penulisan ini meliputi;

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui proses wawancara dan pengamatan berdasarkan topik penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen, laporan, literatur maupun hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

E. Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2014) Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu berupa Tanya jawab langsung terhadap narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara berdasarkan topik penelitian
- b. Penelitian pustaka (library research) yaitu mengumpulkan data dengan mengamati data yang telah ada sebelumnya dalam bentuk laporan, buku-buku, brosur dan dokumen tertulis lainnya.

F. Instrumen Penelitian

Adapun alat-alat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Perekam suara
2. Buku catatan
3. Alat tulis
4. Daftar pertanyaan wawancara.

G. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif, dengan menggambarkan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng, dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng yaitu;

“Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang andal dan peningkatan pendapatan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik”

Dari pernyataan visi tersebut, mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Pengelola keuangan dan aset daerah adalah proses perencanaan, pelaksanaan atau implementasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Andal adalah mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan daerah.
- 3) Peningkatan pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali.
- 4) Pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintah daerah yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga, mensinergikan interaksi yang konstruktif/membangun antara pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat.

b. Misi

Adapun yang menjadi Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng adalah:

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, taat, efisien, responsif, transparan dan akuntabel.

- 2) Penerapan dan perbaikan secara berkesinambungan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas Pengelolaan Asli Daerah (PAD) yang signifikan (nyata) dan berkesinambungan.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 5) Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 6) Peningkatan integritas pengelola keuangan dan aset Desa/Kelurahan untuk mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (good governance)

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng No.69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng, dijelaskan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

- 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a) Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencana strategi dan program kerja Badan sesuai dengan visi misi daerah.
- b) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja Badan sesuai bidang tugasnya.
- c) Mengkoordinasikan penyusunan dan pedoman pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- d) Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e) Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
- f) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- g) Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- h) Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- i) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- j) Melakukan tugas lain sesuai pelimpahan Bupati.

b. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada

semua satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi;

a) Penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

d) Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai uraian tugas:

a) Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c) Menyusun rencana peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat Badan.
- d) Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.
- e) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan.
- f) Melaksanakan pembinaan staf Badan.
- g) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- h) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- i) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan menandatangani sesuai dengan kewenangannya.
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

c. Bidang Anggaran

- 1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seora Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dibidang perencanaan dan penyusunan anggaran, pengendalian dan evaluasi serta pengadministrasian anggaran.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumusan kebijakan teknis dibidang Anggaran.
 - b) Persiapan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- c) Pengendalian pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD.
 - d) Perumusan kebijakan operasional di Bidang Anggaran.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- 3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas:
- a) Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Merumuskan penjabaran kebijakan teknis dinas di Bidang Anggaran.
 - c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
 - d) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
 - e) Menyiapkan bahan pengesahan DPA-SKPD, DPA-PPKD, DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD.
 - f) Melakukan pembinaan penyusunan program dan kegiatan.
 - g) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah.
 - h) Melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Bantaeng.
 - i) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
 - j) Membantu dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

- k) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan menandatangani sesuai dengan kewenangannya.
- l) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pendapatan

- 1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok dibidang pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah, penagihan dan pelaporan serta pelayanan atas pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
 - b) Pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
 - c) Pendaftaran, pendataan, penilaian dan pengadministrasian obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d) Perhitungan, penetapan, penerbitan dokumen ketetapan serta penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - e) Penyusunan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - f) Pelaksanaan validasi dan verifikasi BPHTB.
 - g) Koordinasi pelaksanaan administrasi penerimaan dana transfer dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
 - h) Pengolahan data dan perhitungan bagian desa dari penerimaan pendapatan daerah.

- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai uraian tugas:
- a) Merencanakan operasional rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Merumuskan penjabaran kebijakan teknis dinas dibidang pendapatan.
 - c) Mengkoordinasikan dan membina kegiatan pelaksanaan penagihan dan pendapatan pada setiap perangkat daerah pengelola pendapatan daerah dan mengkoordinasikan fasilitasi administrasi manual pendapatan daerah pada setiap perangkat daerah pengelola pendapatan daerah.
 - d) Merumuskan rencana pengembangan dan penerimaan pendapatan daerah.
 - e) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
 - f) Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi, dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah.
 - g) Mengadakan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
 - h) Melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
 - i) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

- j) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan menandatangani sesuai dengan kewenangannya.
- l) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Perbendaharaan

- 1) Bidang perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok dibidang perumusan kebijakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, penempatan uang daerah serta pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen pembayaran atas beban anggaran daerah yang meliputi verifikasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana SKPD/PPKD, pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai serta pendanaan kegiatan-kegiatan SKPD/PPKD yang tertuang dalam APBD.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
 - a) Pengumpulan dan pengelolaan data anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan biaya daerah.
 - b) Pembinaan administrasi perbendaharaan daerah.
 - c) Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas-tugas dibidang perbendaharaan.
 - d) Koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD.
 - e) Pelaksanaan fungsi BUD.
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas:
- a) Mengumpulkan dan mengelolah data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan dibidang perbendaharaan.
 - b) Menerbitkan SP2D berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran dan pihak lain yang berhak atas beban rekening kas umum daerah.
 - c) Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan penggunaan/penyerapan dana-dana khusus.
 - d) Menyiapkan sistem penatausahaan keuangan SKPD/PPKD yang efektif dan efisien.
 - e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah dan pengelolaan utang dan piutang daerah.
 - f) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
 - g) Melakukan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah.
 - h) Melakukan pengamanan bukti kekayaan daerah Non Aset Tetap.
 - i) Melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
 - j) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
 - k) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

l) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan menandatangani sesuai dengan kewenangannya.

m) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Bidang Aset Daerah

1) Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok di bidang perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi:

a) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah.

b) Pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

c) Perumusan kebijakan operasional pengelolaan aset daerah.

d) Penyelenggaraan evaluasi dan pengelolaan aset daerah.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai uraian tugas:

a) Menyusun rencana teknis dan program kegiatan inventarisasi, pengelolaan aset dan investasi aset daerah

b) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang perencanaan kebutuhan dan investasi aset.

c) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan aset dan investasi aset daerah.

- d) Melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
- e) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- f) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- g) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan menandatangani sesuai dengan kewenangannya.
- h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

g. Bidang Akuntansi

- 1) Bidang akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang melaksanakan tugas pokok dibidang perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi perumusan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi, penganalisaan transaksi keuangan maupun non keuangan, pencatatan penyusunan laporan keuangan dan evaluasi atas laporan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi;
 - a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
 - b) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - c) Pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, dan peringkasan transaksi keuangan dalam pelaksanaan APBD.
 - d) Pembinaan pelaksanaan akuntansi SKPD/PPKD;

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas;
- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi;
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran;
 - c) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan informasi keuangan daerah;
 - d) Koordinasi dengan SKPD terkait dengan laporan keuangan SKPD;
 - e) Melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - f) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
 - g) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - h) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan menandatangani sesuai dengan kewenangannya;
 - i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pimpinan;
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- 4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

i. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB)

- 1) Unit Pelaksana Tugas Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan bidang teknis dan kebutuhan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala unit mempunyai uraian tugas:
 - a) Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTB Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
 - b) Melaksanakan peningkatan kompetensi Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - c) Mengendalikan aktivitas Badan Pengelola Keuangan Daerah di unit pelaksana teknis.

- d) Melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- e) Mengkoordinasi hasil kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah di unit pelaksana teknis.
- f) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

j. Tata Kerja

- 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya berlaku.
- 3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

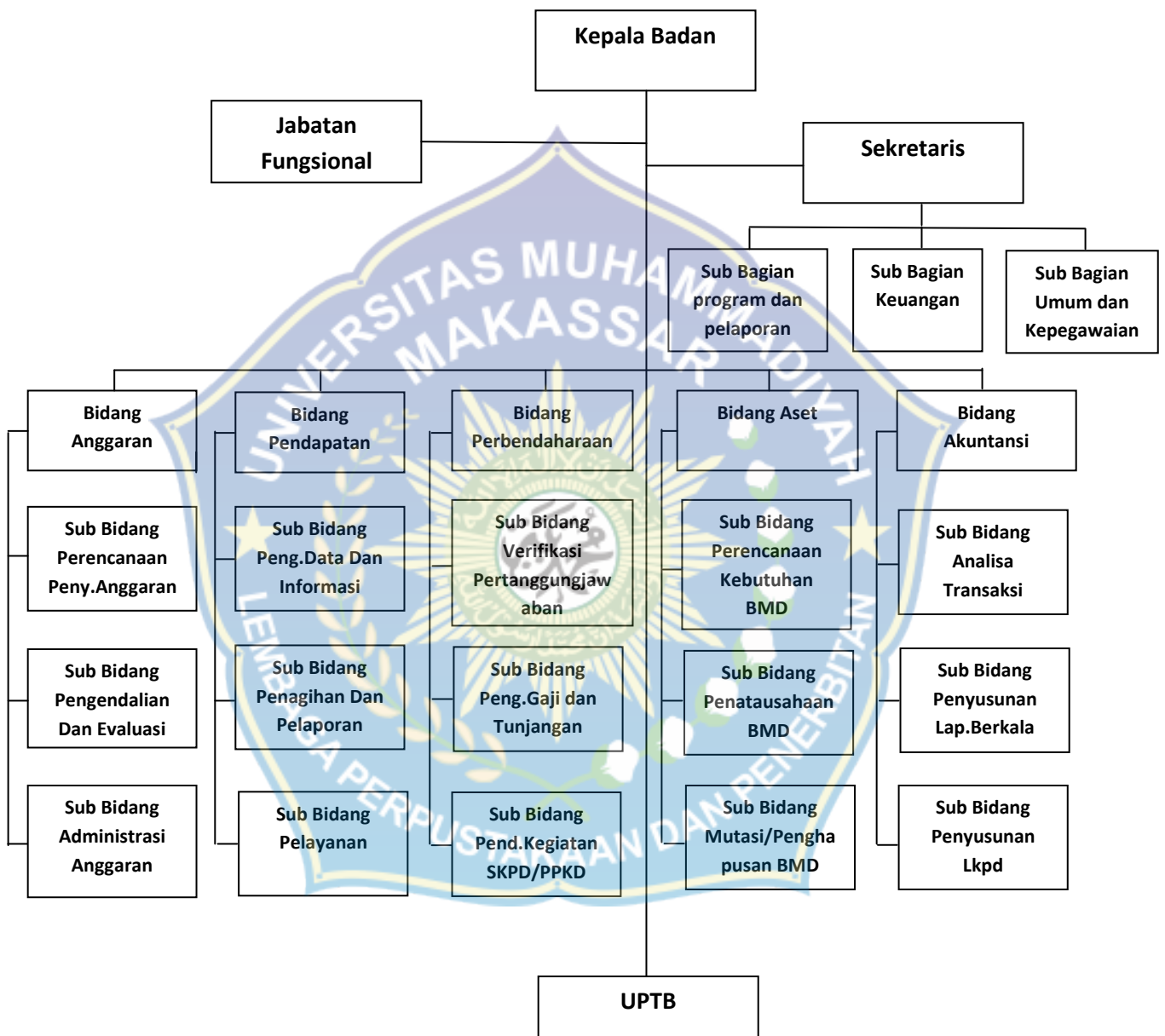
- 6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan persetujuan pimpinan.
- 7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- 8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta melakukan monitoring dan inovasi dan teknologi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan atau staf bawahannya.



3. Struktur Organisasi BPKD

Bagan Susunan Organisasi

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng



Gambar 4.1

B. Kebijakan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BPKD

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual berganti pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut juga diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar akuntansi berbasis akrual, Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bantaeng baru diterapkan pada tahun 2016 yang sebelumnya menerapkan cash basic.

Pada penerapannya, akuntansi berbasis akrual mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan serta mencerminkan suatu laporan yang betul-betul sesuai dengan kemampuan SKPD tersebut, karna basis akrual dicatat berdasarkan transaksi walaupun pendapatan atau belanja belum diterima. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Keuangan BPKD, sebagai berikut;

"Sebetulnya bagus, karna untuk pelaporan membantu. Karna sudah tertera yang ini masuk neraca, kalau kas basic kan biasanya dicari lagi yang mana masuk neraca.

Hal tersebut senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang Penyusun LKPD, sebagai berikut;

"sebenarnya dari segi laporan keuangan SKPD dari sisi laporannya mencerminkan suatu laporan yang betul-betul sesuai dengan kemampuan SKPD tersebut, karna akrual dicatat berdasarkan transaksi walaupun pendapatan atau belanja belum diterima, jadi benar-benar real satu laporan keuangan SKPD.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan bagi pengelola keuangan pemerintah.

Penerapan SAP berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng memang sudah dijalankan secara penuh dengan mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah, namun penerapannya masih dalam tahap penyesuaian. Hal tersebut senada dengan pemaparan Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut;

“iya, tapi masih memakai 2 basic, kas basic dan akrual basic. Yang berbasis akrual hanya penyusunan Neraca, LO, LPE dan CaLK. Sedangkan LRA masih kas basic, karna memang penganggarannya juga masih kas basic. Untuk penerapannya di Pemda belum terlalu maksimal gabung antara kas basic dengan akrual basic, dan juga yang menjadi kendala karna SDMnya sendiri bukan dari akuntansi dan masih belum terlalu paham mengenai akuntansi. Sehingga yang saya terapkan sekarang adalah minimal banyak bertanya dan penerapannya tidak sekaligus”

Pemaparan tersebut sedikit berbeda dengan Kepala Sub Bagian Penyusun LKPD, yang menyatakan bahwa;

“Beberapa SKPD/PPK-SKPD perlu penyesuaian antara aturan yang lama yaitu kas basic dengan akrual, tapi dari segi pelaporan sebenarnya sama, Cuma pengakuan akuntansinya saja yang berbeda.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual belum begitu efektif berjalan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bantaeng. Hal tersebut terkait kendala teknis dan kesiapan aparatur yang belum sepenuhnya paham dan

menguasai SAP berbasis akrual. Maka dari itu hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah agar lebih memperhatikan perangkat kerja yang dimiliki serta menitik beratkan pada penguatan kemampuan SDM sebagai kunci keberhasilan SAP berbasis akrual.

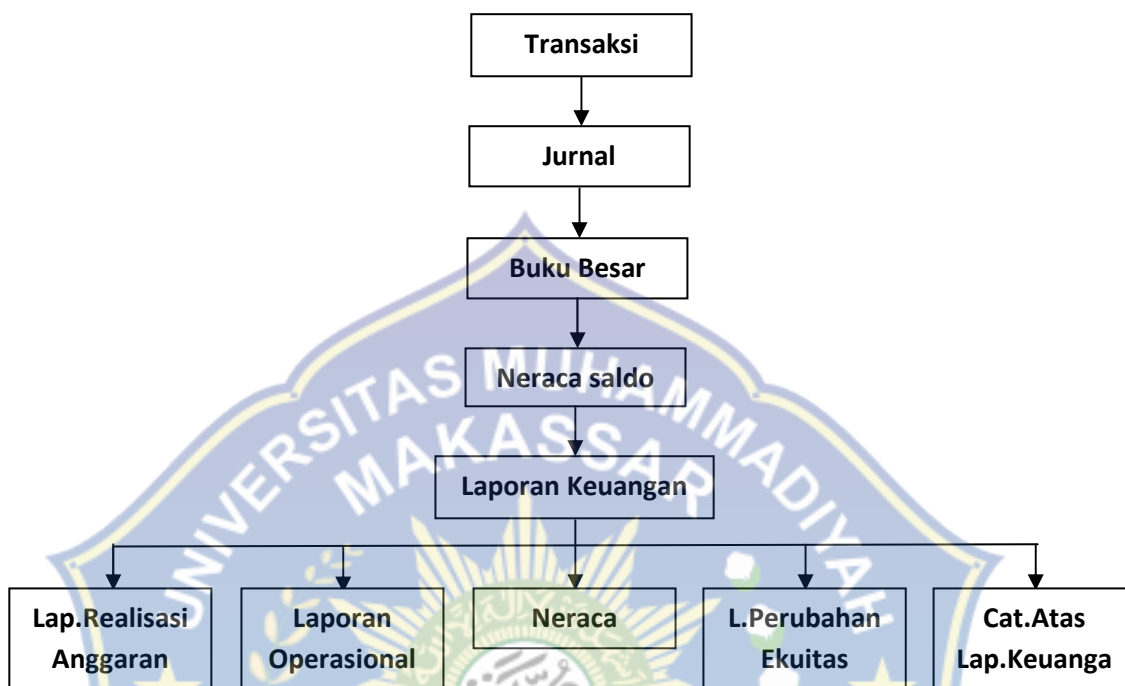
Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah diterapkan secara penuh sejak tahun 2015 dengan pengecualian bagi Laporan Realisasi Anggaran yang masih menggunakan basis kas, karna penganggarannya sendiri masih berbasis kas.

C. Metode Pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada BPKD

1. Flow Proses Pencatatan Akuntansi BPKD

Flow proses pencatatan pada BPKD Kab.Bantaeng dimulai dari pengelolaan barang daerah yang dibuatkan bukti transaksi, dari bukti transaksi tersebut kemudian dibuatkan bukti memorial lalu dilakukan penjurnalan. Penjurnalan tersebut dilakukan oleh PPK-SKPD, setelah itu diposting kedalam buku besar, lalu dibuatkan neraca saldo. Dari neraca saldo SKPD tersebut, PPK-SKPD kemudian menyusun laporan keuangan SKPD yang terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut flow proses pencatatan pada BPKD digambarkan dalam bagan dibawah ini:



Gambar 4.2

a. Transaksi

Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual, dimana pada basis tersebut setiap transaksi langsung dicatat meskipun pendapatan atau belanja belum diterima. Namun, pada BPKD Kab.Bantaeng ada pencatatan yang tidak sesuai dengan Permendagri yang berlaku. Pada penerapannya, pencatatan transaksi tidak sesuai dengan basis akrual, dimana pada saat terjadinya transaksi seperti pembelian perlengkapan, transaksi tersebut tidak

langsung dicatat. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan bahwa;

“banyak transaksi seperti pembelian perlengkapan yang tidak langsung dicatat, dan pada saat dimintai bukti transaksi pencatatan yang dibeli bulan lalu dicatat pada bulan ini.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BPKD belum sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Permendagri No.64 tahun 2013.

b. Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya kedalam buku jurnal. SKPD menjurnal: SPJ penerimaan jurnal penerimaan kas, SPJ pengeluaran dan SP2D dalam register jurnal pengeluaran kas, bukti memorial transaksi aset tetap dalam register jurnal umum, dan bukti memorial transaksi selain kas dalam register jurnal umum.

c. Buku Besar

Tahap selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK-SKPD memposting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun.

d. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun Neraca

Saldo.Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.

e. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Hal tersebut senada dengan pemaparan Kepala Sub Bagian Keuangan BPKD Kab.Bantaeng.

“hanya menyusun 5 Laporan Keuangan yaitu LRA, LO, Neraca, LPE dan CaLK. Untuk SAL dan Arus Kas disusun oleh Pemda”
Berikut penjelasan mengenai Laporan Keuangan Tersebut

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintahan daerah menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual.Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.Dinyatakan dalam ruang lingkup LRA bahwa standar ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Hal tersebut juga senada dengan pemaparan Kepala Sub Bagian Keuangan BPKD Kab.Bantaeng, bahwa;

“yang berbasis akrual hanya penyusunan Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Sedangkan LRA masih berbasis kas, karna penganggarannya juga masih berbasis kas”

Sebagai contoh dalam LRA tercantum pendapatan pajak daerah yang dimana pajak daerah adalah Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang dipungut Pemerintah Kabupaten Bantaeng dari wajib pajak dalam tahun anggaran 2018.

Tabel 4.1

PENDAPATAN PAJAK DAERAH KAB.BANTAENG

Keterangan	Jumlah
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	Rp.11.612.685.829.00.
Laporan Operasional Tahun 2018	Rp.13.202.887.073.84

Sumber: Laporan Keuangan BPKD Kab.Bantaeng

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dalam LRA, penerimaan kas dari pendapatan wajib pajak ini ialah sebesar Rp.11.612.685.829,-. Sedangkan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bantaeng tahun 2018 yaitu sebesar Rp.13.202.887.073.84. dan selisihnya masih menjadi hak pemerintah untuk diterima pada tahun-tahun selanjutnya. Pendapatan wajib ini dicatat dalam LRA hanya sebesar jumlah jumlah kas yang diterima pemerintah sedangkan pada LO mencatat yang menjadi hak pemerintah ditahun 2018.

Sama halnya dengan Pendapatan Retribusi Daerah yaitu PAD yang dipungut Pemerintah Kab.Bantaeng dari Wajib Retribusi.

Tabel 4.2

**PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
KAB.BANTAENG**

Keterangan	Jumlah
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	Rp.5.280.390.045,-
Laporan Operasional Tahun 2018	Rp.6.286.735.851,-

Sumber: Laporan Keuangan BPKD Kab.Bantaeng

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa Penerimaan wajib retribusi yang melalui kas daerah hanya sebesar Rp.5.280.390.045,- sementara hak pemerintah dalam tahun anggaran 2018 sebesar Rp.6.286.735.851,- dan selisihnya merupakan hak pemerintah yang masih harus diterima. Dicatat demikian karena dalam LRA pencatatannya menggunakan basis kas yang hanya dicatat berdasarkan kas yang diterima pemerintah, sedangkan dalam LO dicatat total yang menjadi hak pemerintah pada tahun 2015 tersebut. LRA mencatat kas yang terealisasi pada periode tersebut dan selisihnya masih menjadi hak pemerintah untuk diterima pada tahun-tahun selanjutnya.

Berbeda dengan pos pendapatan dana bagi hasil pajak. Jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kab.Bantaeng dalam pos pendapatan bagi hasil pajak tahun 2018 adalah sebesar Rp.10.273.180.777,-. Jumlah ini 100% telah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah Kab.Bantaeng.oleh karena itu jumlah yang tertera pada LRA dan LO nilainya sama, sebab hak pemerintah dari pendapatan bagi hasil pajak telah 100% diterima dan masuk di kas daerah. Begitupun dengan pos-pos yang serupa

dalam LRA. Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Laporan Operasional (LO)

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

Sebagai contoh Pendapatan Pajak daerah yang tercantum dalam LO. Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kab. Bantaeng tahun 2018, dapat dilihat pada table 4.3 sebagai berikut;

Tabel 4.3

PENDAPATAN PAJAK DAERAH KAB. BANTAENG

Keterangan	Jumlah
Laporan Operasional Tahun 2018	Rp.13.202.887.073.84
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	Rp.11.612.685.829.00
Selisih	Rp.1.590.201.244.84

Sumber: Laporan Keuangan BPKD Kab. Bantaeng

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kab.Bantaeng tahun 2018, yaitu sebesar Rp.13.202.887.073.84 sementara penerimaan kas dari pendapatan pajak ini hanya sebesar Rp.11.612.685.829,- (LRA). Jumlah selisih sebesar Rp.1.590.201.244.84 masih menjadi hak pemerintah untuk diterima pada tahun-tahun selanjutnya. Pendapatan ini dicatat dalam LO yaitu mencatat jumlah dari yang menjadi hak dari tahun 2018. Sedangkan, LRA hanya mencatat sebesar jumlah kas yang diterima pemerintah dan selisihnya masih menjadi hak pemerintah untuk diterima pada tahun-tahun selanjutnya.

3) Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual.

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Penjelasan tersebut diklasifikasi dalam CaLK. Adanya pengaruh dari basis akrual salah satunya ialah keberadaan pos

piutang seperti piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil dan piutang lainnya. Contohnya piutang pemerintah Kab. Bantaeng dari sumber pajak daerah sebesar Rp.6.722.431.634.23. Jumlah tersebut adalah nilai kotor (sebelum dikurangi dengan penyisihan piutang). Perincian mengenai piutang dan penyisihan sebagaimana aging schedule terlampir (CaLK).

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan keuangan selanjutnya adalah Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir (Permendagri No.64 Tahun 2013). LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut;

Tabel 4.4

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BPKD
KAB. BANTAENG**

Keterangan	Jumlah
Ekuitas Awal	Rp.2.202.202.022.742.67
Surplus/Defisit-LO	(Rp.51.595.724.586.78)

Sumber: Laporan Keuangan BPKD Kab. Bantaeng

Berdasarkan tabel 4.4 tercantum bahwa dalam LPE, ekuitas awal sebesar Rp.2.202.202.022.742.67 dan surplus/defisit LO (Rp.51.595.724.586.78). Untuk unsur yang menambah ekuitas

dan mengurangi kuitas lebih rinci dipaparkan dalam CaLK. Struktur LPE baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan pada BPKD Kab.Bantaeng telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Sistem Pencatatan

a. Pengakuan Pendapatan

Sistem pencatatan yang digunakan BPKD adalah sistem yang berbasis akrual, dimana pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi, tanpa menunggu dana diterima kemudian dicatat. Pendapatan pada BPKD Kab.Bantaeng bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pendapatan Pajak Daerah

- b) Pendapatan Retribusi Daerah
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d) Lain-lain PAD yang sah

2) Pendapatan Transfer

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus

b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

- Dana Otonomi Khusus
- Dana Penyesuaian

c) Transfer Pemerintah Provinsi

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

- a) Pendapatan Hibah
- b) Pendapatan Dana Darurat
- c) Pendapatan Lainnya

b. Pengakuan Beban

Basis yang digunakan dalam pengakuan beban adalah basis akrual, dimana titik pengakuan adalah pada saat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kewajiban, konsumsi atas aset, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih entitas pelaporan walaupun belum ada pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

c. Pengakuan Aset

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial dimasa depan.

Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kekuatan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Hal tersebut juga sama dengan BPKD Kab.Bantaeng, berikut aset yang dimiliki oleh BPKD Kab.Bantaeng:

- 1) Aset Lancar
 - a) Kas dan Bank
 - b) Piutang Pendapatan
 - c) Piutang Retribusi Daerah
 - d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

- e) Piutang Bagi Hasil
 - f) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
 - g) Piutang lainnya
 - h) Belanja Dibayar Dimuka
 - i) Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
 - j) Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat
 - k) Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
 - l) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
 - m) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
 - n) Persediaan
- 2) Aset Tetap
- a) Tanah
 - b) Peralatan dan Mesin
 - c) Gedung dan Bangunan
 - d) Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e) Aset Tetap Lainnya
 - f) Konstruksi dalam Pengerjaan
 - g) Akumulasi Penyusutan
- 3) Aset Lainnya
- a) Tagihan Penjualan Angsuran
 - b) Tuntutan Ganti Rugi
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - d) Aset Tak Berwujud
 - e) Aset Lain-lain

D. Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas saja masih banyak menghadapi hambatan, lebih-lebih lagi jika pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Berikut beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah;

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompoten merupakan faktor penting bagi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual, sebab SDM yang bekerja dan turun langsung menjalankannya. Saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual. Untuk itu pemerintah pusat daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Untuk menerapkan basis akrual, diperlukan pemahaman khusus mengingat SAP ini tergolong baru dipemerintahan. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan implementasi basis akrual ini.

Suatu perencanaan dan penganggaran yang telah disusun demi memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya ini memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar apa yang ada dalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan. Mekanisme pengelolaan yang dimaksud adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman dalam

mengarahkan sumber daya pada suatu tujuan serta sasaran. Perangkat aturan atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan public dan alokasi sumber daya ini akan berjalan dengan lancar dan efektif jika didukung oleh regulasi yang memadai sehingga mendorong berlakunya praktek yang baik, tertib dan akuntabel (Bastian, 2010).

Pemahaman staf mengenai SAP berbasis akrual pada BPKD belum begitu menyeluruh. Sebelumnya telah dipaparkan bahwa SDM belum sepenuhnya menguasai basis akrual dan juga belum terlalu memahami tentang akuntansi itu sendiri. Bukan hanya dari segi kualitas SDM melainkan jumlah SDM pada BPKD masih terbilang kurang. Hal lain yang menjadi kendala ialah latar belakang pendidikan staf yang berasal dari jurusan akuntansi masih sangat kurang. Berikut pemaparan yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan BPKD, sebagai berikut;

“Banyak kendala, SDMnya banyak yang tidak paham dengan alur akuntansi, yang kedua banyak transaksi seperti pembelian perlengkapan yang tidak langsung dicatat, dan pada saat dimintai bukti transaksi pencatatan yang dibeli bulan lalu dan dicatat pada bulan ini.”

Kemudian dipertegas lagi pada jawaban Kepala Sub Bagian Keuangan dari pertanyaan selanjutnya mengenai pemahaman staf terhadap akuntansi berbasis akrual, yaitu;

“Masih kurang paham karna yang dari akuntansi murni, hanya 4 orang yang lulusan akuntansi”

Pemaparan tersebut juga senada dengan pemaparan Kepala Sub Bagian Penyusunan LKPD, yang menyatakan bahwa;

“Banyak, antara lain perlunya penyesuaian masing-masing SKPD dari basis kas ke basis akrual, pemahaman SDM masih kurang, terus kendalanya terkadang adanya permasalahan suatu kebijakan seperti penunjukan bendahara yang tidak mempunyai ilmu atau pendidikan dibidang pencatatan/akuntansi, serta sebagian besar staf dari jurusan lain”

Kurangnya pemahaman SDM terhadap akuntansi berbasis akrual tidak hanya dikarenakan oleh latar pendidikan, tapi juga kurangnya pelatihan terkait SAP berbasis akrual. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, yang menyatakan bahwa;

“Untuk tahun ini tidak diadakan pelatihan sistem akuntansi pemerintah daerah, tahun-tahun sebelumnya mulai dari tahun 2014-2018 dilakukan pelatihan, hanya saja pelatihannya akrual perusahaan bukan akrual pemerintah”

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian penyusun LKPD, bahwa;

“Pada tahun ini 2019 baru tidak ada. Karna mungkin dari segi penganggaran, dan yang kedua adalah ketika ada kendala langsung ke bagian akuntansi dan diselesaikan di ruangan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa staf pada Badan Pengelola Keuangan Daerah belum sepenuhnya paham mengenai penerapan SAP berbasis akrual. Masih kurangnya staf yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan kurangnya pelatihan secara berkala menjadi faktor penerapan SAP berbasis akrual belum maksimal.

2. Sistem Akuntansi dan IT

Sistem akuntansi dan IT adalah sarana atau alat dalam menjalankan SAP berbasis akrual. Penggunaan teknologi informasi yang

andal diperlukan guna mendukung keberhasilan pengelolaan data dan pengembangan sistem akuntansi. Kesiapan sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari sistem yang digunakan dalam membuat pelaporan keuangan. Penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit badan Pengelola Keuangan Daerah saat ini memiliki sistem yang mendukung penerapan basis akrual dan telah mulai dikembangkan. Berikut pernyataan dari Kepala Sub Bidang Keuangan mengenai hal tersebut;

“kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk akuntansinya sendiri jadi ada pengembangan teknologi yang sangat menolong. yang tidak begitu menguasai akuntansi terbantuan dengan adanya program, Cuma kendalanya akuntansi murninya malah tidak terlaui dipahami. Makanya diakhir tahun baru ada penyesuaian neraca dan sebagainya. Kita Cuma menginput masuk mau lihat LRA buka program langsung tertera LRAny, mau liat neracanya buka program langsung neracanya. Jadi hasil program yang biasanya kita urai kembali, karna banyak yang biasa kita dapati bukan tempatnya disini, ada program mengarahkan kita”

Pernyataan yang mendukung juga diberikan oleh Kepala Sub Bagian Penyusun LKPD, yaitu;

“iya, sudah dilengkapi dengan aplikasi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Bantaeng dari segi sistem akuntansi dan IT yang menunjang penerapan basis akrual telah tersedia dan dikembangkan. Hanya saja dalam program tersebut memiliki kendala yaitu akuntansi murninya tidak begitu

dipahami. Sehingga perlu dilakukan pemahaman-pemahaman dengan akuntansi murni.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Bantaeng belum maksimal dalam menerapkan sistem akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Karena dalam sistem pencatatan transaksi masih ada beberapa transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan tanggal kejadiannya.
2. Sumber Daya Manusia pada BPKD kurang dari disiplin Ilmu Akuntansi sehingga kemampuannya memahami Sistem Akuntansi Akrual masih terbatas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah ditemukan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan penerapan SAP berbasis akrual pada BPKD Kabupaten Bantaeng. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah;

1. Sistem Pencatatan Akuntansi harus dilakukan sesuai dengan tanggal transaksi dan didukung dengan dokumen.

2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada melalui pelatihan secara rutin, kemudian dalam penerimaan pegawai berikutnya untuk bagian akuntansi harus disiplin Ilmu Akuntansi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D., 2015. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal, Palopo: Sekolah Tinggi Ekonomi Muhammadiyah.
- Andini, D., 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal, Riau: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau.
- Ardana, C., dan Lukman, H., 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit: Mitra Wacana Media.
- Baridwan, Z., 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit: Erlangga.
- Deisana, K., 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal, Singaraja: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Singaraja Indonesia.
- Hall, J.A., 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba 4: Jakarta.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantang.
- Lili M. Sadeli, L.M., 2014. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Penerbit: Bumi Aksara.
- Mulyadi., 2016. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta Selatan.
- Nazir, M., 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
- Rahmawan, A., 2012. *Kajian Penggunaan Informasi Daerah*. Jurnal, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Soleha, N., 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Sugiyono., 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono., 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Supriyadi, B., Suwandi, D., dan Manghayu, A., 2017. *Kebijakan Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah*. Penerbit: Ghalia Indonesia.

Widyastuti, N.M.A., Sujana, E., dan Adiputra, I.M.P., 2015. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Di Kabupaten Gianyar*. e-journalSI Ak, Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Volume 3 No.1.



LAMPIRAN 1

Hasil Wawancara

Informan 1

Nama : Bahruddin, SE, MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Tanggal : 18 Juni 2019

1. Apakah bapak sudah mengetahui aturan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Permendagri No.64 tahun 2013?

Informan:

Iya.

2. Apakah laporan keuangan yang disusun sudah berbasis akrual?

Informan:

Iya, tapi masih memakai 2 basic, cash basic dan akrual basic. Yang berbasis akrual hanya penyusunan Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Sedangkan untuk LRA masih cash basic, karna penganggarannya sendiri masih cash basic.

3. Bagaimana tanggapan bapak terkait Permendagri No.64 Tahun 2013?

Informan:

Sebetulnya bagus, namun penerapannya masih belum terlalu maksimal karna masih memakai 2 basic. Iya, tapi masih memakai 2 basic, kas basic dan akrual basic. Yang berbasis akrual hanya penyusunan Neraca, LO, LPE dan CaLK. Sedangkan LRA masih kas basic, karna memang penganggarannya juga masih kas basic. Untuk penerapannya di Pemda belum terlalu maksimal gabung antara kas basic dengan akrual basic, dan juga yang menjadi kendala karna SDMnya sendiri bukan dari akuntansi dan masih belum terlalu paham mengenai akuntansi. Sehingga yang saya terapkan sekarang adalah minimal banyak bertanya dan penerapannya tidak sekaligus

4. Bagaimana tanggapan bapak setelah menerapkan akuntansi berbasis akrual?

Informan:

Sebetulnya bagus, karna untuk pelaporan membantu. Karna sudah tertera yang ini masuk neraca, kalau kas basic kan biasanya dicari lagi yang mana masuk neraca

5. Apakah SAP berbasis akrual telah diterapkan secara efektif?

Informan:

Sudah efektif dan sudah mengarah kesana, hanya saja belum maksimal.

6. Apakah ada SOP pencatatan akuntansi?

Informan:

Ada, kalau pencatatan akuntansinya kita memakai SOP Pemda.

7. Apakah ada job desc yang telah disetujui untuk masing-masing pihak (atasan, staf)?

Informan:

Ada

8. Apakah ada pedoman jurnal?

Informan:

Ada

9. Apakah ada petunjuk teknis sistem pencatatan akuntansi aktivitas?

Informan:

Ada, terakomodasi

10. Apakah PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja untuk penyusunan laporan keuangan? Yang terdiri dari:

- Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian
- Membuat Jurnal Penyesuaian
- Membuat neraca saldo sebelum penyesuaian

Informan:

Pake, tapi terprogram pada aplikasi dan disusun pada akhir tahun

11. Apakah laporan keuangan sudah disusun lengkap? Yang terdiri dari:

- LRA (Laporan Realisasi Anggaran Lebih)
- Laporan SAL (Saldo Anggaran Lebih)
- Laporan Operasional
- Neraca

- Laporan Perubahan Ekuitas
- Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Informan:

Hanya menyusun 5 laporan keuangan yaitu LRA, LO, Neraca dan CaLK. Untuk SAL dan Arus kas disusun oleh Pemda.

12. Apakah setiap transaksi sudah dilengkapi dengan bukti pendukung?

Informan:

Iya, harus.

13. Apakah bukti pendukung tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat terkait?

Ada, nanti setelah terbit SP2D baru dibukukan dan dianggap sudah diotorisasi.

14. Apakah dalam penerapan SAP berbasis akrual terdapat kendala? Apa saja kendalanya?

Informan:

Banyak kendala, SDMnya banyak yang tidak paham dengan alur akuntansi, banyak transaksi seperti pembelian perlengkapan yang tidak langsung dicatat, dan pada saat dimintai bukti transaksi pencatatan yang dibeli bulan lalu di catat pada bulan ini.

15. Apakah staf sudah sepenuhnya paham dengan penerapan akuntansi berbasis akrual?

Informan:

Masih kurang paham karna tidak ada yang dari akuntansi murni, hanya 4 orang yang lulusan akuntansi.

16. Apakah latar belakang pendidikan staf merupakan lulusan dari jurusan akuntansi?

Informan:

untuk tahun ini tidak diadakan pelatihan SAP daerah, untuk tahun-tahun sebelumnya mulai dari tahun 2014-2018, hanya saja pelatihannya akrual perusahaan bukan akrual pemerintah.

17. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SAP berbasis Akrual? Apakah sudah ada pengembangan dari segi teknologi?

Informan:

Untuk sarana dan prasarananya sudah ada pengembangan dari segi teknologi.

Hasil Wawancara

Informan 2

Nama : Vandy Fajriansyah, SE, MM

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusun LKPD

Tanggal : 25 Juni 2019

1. Apakah bapak sudah mengetahui aturan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Permendagri No.64 tahun 2013?

Informan:

Iya, sudah dipake sejak tahun 2016. Untuk penyusunan tahun 2015

2. Apakah laporan keuangan yang disusun sudah berbasis akrual?

Informan:

Iya

3. Bagaimana tanggapan bapak terkait Permendagri No.64 Tahun 2013?

Informan:

Sebenarnya dari segi Laporan Keuangan SKPD dari sisi laporannya, mencerminkan suatu laporan yang betul-betul sesuai dengan kemampuan SKPD tersebut. Karna, akrual itu dicatat berdasarkan transaksi walaupun pendapatan atau belanja belum diterima, jadi mencerminkan betul-betul satu laporan keuangan SKPD.

4. Bagaimana tanggapan bapak setelah menerapkan akuntansi berbasis akrual?

Informan

Memang perlu beberapa SKPD/PPK-SKPD perlu penyesuai antara aturan yang lama yaitu cash basic dengan akrual, tapi kalau dari segi pelaporannya

sebenarnya sama, Cuma dari pengakuan akuntansinya saja yang berbeda. Tapi dari sudut pengerjaannya sama

5. Apakah SAP berbasis akrual telah diterapkan secara efektif?

Informan:

Iya, sudah. Sudah sampai tahun ketiga kayaknya tahun ini, 2018 disusul 2019 berarti sudah tahun ke-3

6. Apakah ada SOP pencatatan akuntansi?

Informan:

Ada, disusun di kebijakan akuntansi dengan Sisdur (sistem Prosedur) .

7. Apakah ada job desc yang telah disetujui untuk masing-masing pihak (atasan, staf)?

Informan:

Ituakan sudah diatur di masing-masing staf, ada SKnya masing-masing. Dalam SK itu sudah ditentukan masing-masing tugasnya, seperti bendahara.

8. Apakah ada pedoman jurnal?

Informan:

Iya, ada.

9. Apakah ada petunjuk teknis sistem pencatatan akuntansi aktivitas?

Informan:

Sudah dimasukkan semua ke kebijakan akuntansi tentang pencatatannya.

10. Apakah PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja untuk penyusunan laporan keuangan? Yang terdiri dari:

- Mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian
- Membuat jurnal penyesuaian
- Membuat neraca saldo sebelum penyesuaian

Informan:

Kertas kerja pasti ada, karna dari kertas kerja dikumpulkan dan disatukan menjadi laporan keuangan.

11. Apakah laporan keuangan sudah disusun lengkap? Yang terdiri dari:

- LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
- Laporan SAL (Saldo Anggaran Lebih)

- Laporan Operasional
- Neraca
- Perubahan Ekuitas
- Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Informan:

Iya, sudah. Kalau akrual pasti harus ada.

12. Apakah setiap transaksi sudah dilengkapi dengan bukti pendukung?

Informan:

Ada

13. Apakah bukti pendukung tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat terkait?

Informan:

Ada, seperti otorisasi penerimaan dari bendahara umum daerah yang mengesahkan bahwa penerimaan tersebut sudah disetor ke penerimaan kas daerah, dan dari segi pengeluarannya penandatanganan kuasa BPD atas SP2D yang terbit.

14. Apakah dalam penerapan SAP berbasis akrual terdapat kendala? Apa saja kendalanya?

Informan:

Banyak, antara lain perlunya penyesuaian masing-masing teman-teman di SKPD dari cash basic menjadi akrual, yang kedua pemahaman SDM masih kurang,, dan kendalanya lagi terkadang adanya suatu permasalahan atau suatu kebijakan yang harus dilaksanakan, seperti penunjukan bendahara yang tidak mempunyai ilmu atau pendidikan dibidang pencatatan/akuntansi.

15. Apakah staf sudah sepenuhnya paham dengan penerapan akuntansi berbasis akrual?

Informan:

Iya, sudah ada gambaran tentang akuntansi akrual.

16. Apakah latar belakang pendidikan staf merupakan lulusan dari jurusan akuntansi?

Informan:

Ada jurusan dari jurusan lain juga, kalau sekarang sebagian besar dari jurusan lain.

17. Apakah sering diadakan pelatihan terkait perubahan SAP daerah?

Informan:

Tahun 2019 ini baru tidak dilaksanakan, karna mungkin pertama dari segi penganggaran, dan yang kedua adalah seumpama ada kendala di SKPD langsung kesini dibidang akuntansi dan diselsaikan disini.

18. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SAP berbasis Akrua? Apakah sudah ada pengembangan dari segi teknologi?

Informan:

Ada, Sudah dilengkapi dengan aplikasi.



Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan



Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penyusun LKPD



Bidang Akuntansi



Bagian Keuangan dan Sekretariat BPKD





PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	44,091,240,671.44	11,612,685,829.00	26.34	10,182,544,016.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	14,621,575,000.00	5,280,390,045.00	36.11	5,779,292,763.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,900,000,000.00	4,790,269,590.00	81.19	5,964,250,856.52
6	Lain-lain PAD yang Sah	70,987,197,771.80	72,947,369,243.18	102.76	43,276,405,148.12
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	135,600,013,443.24	94,630,714,707.18	69.79	65,202,492,783.64
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	12,311,023,000.00	10,273,180,777.00	83.45	14,214,269,983.00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4,726,766,000.00	4,343,619,422.00	91.89	3,872,046,909.00
13	Dana Alokasi Umum	494,749,832,000.00	494,749,832,000.00	100.00	493,079,256,000.00
14	Dana Alokasi Khusus	227,279,333,850.00	215,529,019,670.00	94.83	135,348,038,100.00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	739,066,954,850.00	724,895,651,869.00	98.08	646,513,610,992.00
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	47,790,336,000.00	47,832,248,000.00	100.09	115,898,204,940.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	47,790,336,000.00	47,832,248,000.00	100.09	115,898,204,940.00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36,887,488,236.00	30,233,425,360.00	81.96	33,853,025,220.00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	39,283,823,040.00	9,179,021,124.00	23.37	2,024,101,200.00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	76,171,311,276.00	39,412,446,484.00	51.74	35,877,126,420.00
26	Total Pendapatan Transfer	863,028,602,126.00	812,140,346,353.00	94.10	798,288,942,352.00
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	33,463,473,000.00	25,241,640,000.00	75.43	26,993,830,770.00
30	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya	-	13,000,000.00	100.00	5,497,306,126.00
32	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	33,463,473,000.00	25,254,640,000.00	75.47	32,491,136,896.00
33	JUMLAH PENDAPATAN	1,032,092,088,569.24	932,025,701,060.18	90.30	895,982,572,031.64
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	347,769,478,817.00	335,615,021,251.00	96.51	303,338,457,675.00
38	Belanja Barang	279,938,836,536.92	246,870,662,024.20	88.19	276,003,063,031.00
39	Bunga	-	-	-	16,614,719.14
40	Subsidi	-	-	-	-
41	Hibah	49,065,100,550.00	46,599,001,595.00	94.97	18,476,650,850.00
42	Bantuan Sosial	730,000,000.00	580,000,000.00	79.45	300,000,000.00
43	Jumlah Belanja Operasi	677,503,415,903.92	629,664,684,870.20	92.94	598,134,786,275.14
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	1,424,500,000.00	361,418,280.00	25.37	3,811,464,760.00
47	Belanja Peralatan dan Mesin	48,560,043,021.00	46,570,877,126.00	95.90	35,792,659,061.00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	69,080,768,030.00	50,680,910,305.00	73.36	82,192,395,644.00
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	139,661,711,040.00	108,777,777,295.00	77.89	102,845,757,500.00
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,320,436,000.00	671,894,100.00	50.88	4,904,824,359.00
51	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
52	Jumlah Belanja Modal	260,047,458,091.00	207,062,877,106.00	79.63	229,547,101,324.00
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	726,407,000.00	176,283,700.00	24.27	239,018,546.00
56	Jumlah Belanja Tak Terduga	726,407,000.00	176,283,700.00	24.27	239,018,546.00
57	JUMLAH BELANJA	938,277,280,994.92	836,903,845,676.20	89.20	827,920,906,145.14
58					

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
1	2	3	4	5	6
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	1,021,443,994.00	403,764,650.00	39.53	-
62	Bagi Hasil Retribusi	566,102,524.00	254,449,215.00	44.95	-
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
64	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	1,587,546,518.00	658,213,865.00	41.46	-
65					
66	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN				
67	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	90,000,540,400.00	90,000,540,400.00	100.00	66,871,560,000.00
68	Bantuan Keuangan Lainnya	1,492,730,292.00	1,056,952,800.00	70.81	-
69	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	91,493,270,692.00	91,057,493,200.00	99.52	66,871,560,000.00
70	Jumlah Transfer	93,080,817,210.00	91,715,707,065.00	98.53	66,871,560,000.00
71	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1,031,358,098,204.92	928,619,552,741.20	90.04	894,792,466,145.14
72					
73	SURPLUS/DEFISIT	733,990,364.32	3,406,148,318.98	464.06	1,190,105,886.50
74					
75	PEMBIAYAAN				
76					
77	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
78	Penggunaan SILPA	2,266,009,635.68	2,266,009,635.68	100.00	3,253,034,331.59
79	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
80	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
81	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
82	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
84	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
85	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
87	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
88	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
89	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
90	Jumlah Penerimaan	2,266,009,635.68	2,266,009,635.68	100.00	3,253,034,331.59
91					
92	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
93	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
94	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	100.00	2,000,000,000.00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	177,130,582.41
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
100	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
101	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
102	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
103	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
104	Jumlah Pengeluaran	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	100.00	2,177,130,582.41
105	PEMBIAYAAN NETO	(733,990,364.32)	(733,990,364.32)	100.00	1,075,903,749.18
106					
107	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI	-	2,672,157,954.66	100.00	2,266,009,635.68
108					
109	Koreksi SILPA	-	(157,052,792.00)	100.00	-
110	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	2,515,105,162.66	100.00	2,266,009,635.68

Bantaeng, 24 Mei 2019
Bupati Bantaeng,

ILHAM SYAH AZIKIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	13,202,887,073.84	11,477,482,659.00	1,725,404,414.84	15.03
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5,227,135,208.66	6,286,735,851.00	(1,059,600,642.34)	(16.85)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,437,903,580.68	5,964,250,856.52	(526,347,275.84)	(8.83)
6	Lain-lain PAD yang Sah	81,512,430,947.18	53,028,366,176.12	28,484,064,771.06	53.71
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	105,380,356,810.36	76,756,835,542.64	28,623,521,267.72	37.29
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	10,273,180,777.00	14,214,269,983.00	(3,941,089,206.00)	(27.73)
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4,343,619,422.00	3,872,046,909.00	471,572,513.00	12.18
12	Dana Alokasi Umum	494,749,832,000.00	493,079,256,000.00	1,670,576,000.00	0.34
13	Dana Alokasi Khusus	215,529,019,670.00	135,348,038,100.00	80,180,981,570.00	59.24
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	724,895,651,869.00	646,513,610,992.00	78,382,040,877.00	12.12
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
17	Dana Penyesuaian	47,832,248,000.00	115,898,204,940.00	(68,065,956,940.00)	(58.73)
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	47,832,248,000.00	115,898,204,940.00	(68,065,956,940.00)	(58.73)
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35,385,018,524.00	32,781,423,970.00	2,603,594,554.00	7.94
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	9,179,021,124.00	2,024,101,200.00	7,154,919,924.00	353.49
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	44,564,039,648.00	34,805,525,170.00	9,758,514,478.00	28.04
23	Jumlah Pendapatan Transfer	817,291,939,517.00	797,217,341,102.00	20,074,598,415.00	2.52
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	25,241,640,000.00	38,802,675,586.00	(13,561,035,586.00)	(34.95)
26	Pendapatan Lainnya	13,000,000.00	5,497,306,126.00	(5,484,306,126.00)	(99.76)
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	25,254,640,000.00	44,299,981,712.00	(19,045,341,712.00)	(42.99)
28	JUMLAH PENDAPATAN	947,926,936,327.36	918,274,158,356.64	29,652,777,970.72	3.23
29	BEBAN				
30	BEBAN OPERASI				
31	Beban Pegawai	355,056,385,716.00	303,689,267,796.00	51,367,117,920.00	16.91
32	Beban Barang Jasa	270,246,248,661.33	288,405,023,927.95	(18,158,775,266.62)	(6.30)
33	Beban Persediaan	44,895,780,496.02	37,504,237,368.95	7,391,543,127.07	19.71
34	Beban Jasa	180,643,512,126.31	195,935,823,465.00	(15,292,311,338.69)	(7.80)
35	Beban Pemeliharaan	7,581,004,990.00	5,680,174,078.00	1,900,830,912.00	33.46
36	Beban Perjalanan Dinas	37,125,951,049.00	49,101,089,691.00	(11,975,138,642.00)	(24.39)
37	Beban Dana BOS	-	183,699,325.00	(183,699,325.00)	(100)
38	Beban Bunga	-	14,027,433.19	(14,027,433.19)	(100)
39	Beban Subsidi	-	-	-	-
40	Beban Hibah	37,569,582,846.00	18,476,650,850.00	19,092,931,996.00	103.34
41	Beban Bantuan Sosial	580,000,000.00	300,000,000.00	280,000,000.00	93.33
42	Beban Penyusutan	243,417,570,162.03	190,057,791,926.41	53,359,778,235.62	28.08
43	Beban Lain-lain	760,882,763.78	526,626,484.13	234,256,279.65	44.48
44	Jumlah Beban Operasi	907,630,670,149.14	801,469,388,417.68	106,161,281,731.46	13.25
45	BEBAN TRANSFER				
46	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	403,764,650.00	424,206,255.00	(20,441,605.00)	(4.82)
47	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	254,449,215.00	298,918,180.00	(44,468,965.00)	(14.88)
48	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
49	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	90,000,540,400.00	66,871,560,000.00	23,128,980,400.00	34.59
50	Beban Transfer Keuangan Lainnya	1,056,952,800.00	614,528,775.00	442,424,025.00	71.99
51	Jumlah Beban Transfer	91,715,707,065.00	68,209,213,210.00	23,506,493,855.00	34.46

NO	URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
52	JUMLAH BEBAN	999,346,377,214.14	869,678,601,627.68	129,667,775,586.46	14.91
53	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(51,419,440,886.78)	48,595,556,728.96	(100,014,997,615.74)	(205.81)
54	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
55	SURPLUS NON OPERASIONAL				
56	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
57	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
58	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
59	Jumlah Surplus Non Operasional	-	-	-	-
60	DEFISIT NON OPERASIONAL				
61	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
62	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	4,804,414.21	(4,804,414.21)	(100)
63	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
64	Jumlah Defisit Non Operasional	0.00	4,804,414.21	(4,804,414.21)	(100)
65	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.00	(4,804,414.21)	4,804,414.21	(100)
66	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(51,419,440,886.78)	48,590,752,314.75	(100,010,193,201.53)	(205.82)
67	POS LUAR BIASA				
68	PENDAPATAN LUAR BIASA				
69	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
70	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
71	BEBAN LUAR BIASA				
72	Beban Luar Biasa	176,283,700.00	239,018,546.00	(62,734,846.00)	(26.25)
73	Jumlah Beban Luar Biasa	176,283,700.00	239,018,546.00	(62,734,846.00)	(26.25)
74	POS LUAR BIASA	(176,283,700.00)	(239,018,546.00)	62,734,846.00	(26.25)
75	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(51,595,724,586.78)	48,351,733,768.75	(99,947,458,355.53)	(206.71)

Bantaeng, 24 Mei 2019
Bupati Bantaeng,

ILHAM SYAH AZIKIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	2018	2017
1	2	3	4
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Bank		
4	Kas di Kas Daerah	1,308,427,476.80	1,578,068,350.21
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,636,964.00	80,851,625.51
6	Kas di Bendahara Penerimaan	244,490,171.00	91,577,820.00
7	Kas di Bendahara JKN	612,279,331.03	52,049,386.96
8	Kas di Bendahara BOS	97,435,408.00	108,213,778.00
9	Kas di Bendahara BLUD	164,086,170.00	209,737,667.00
10	Investasi Jangka Pendek	-	-
11	Piutang Pendapatan		
12	Piutang Pajak Daerah	6,722,431,634.23	5,122,402,920.23
13	Penyisihan Piutang Daerah	(1,764,155,470.84)	(1,184,463,384.97)
14	Piutang Pajak Netto	4,958,276,163.39	3,937,939,535.26
15	Piutang Retribusi Daerah	1,069,730,000.00	1,198,304,837.00
16	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(89,293,900.00)	(31,396,524.19)
17	Piutang Retribusi Netto	980,436,100.00	1,166,908,312.81
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9,450,000.00	-
19	Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	(616,537.50)	-
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	8,833,462.50	0.00
21	Piutang Bagi hasil	-	-
22	Penyisihan Piutang Bagi hasil	-	-
23	Piutang Bagi hasil Netto	0.00	-
24	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	11,098,836,069.00	5,947,242,905.00
25	Penyisihan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(55,494,180.35)	(29,736,214.53)
26	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	11,043,341,888.65	5,917,506,690.47
27	Piutang Lainnya	23,670,894,054.00	15,166,701,821.86
28	Penyisihan Piutang Lainnya	(260,210,395.40)	(340,812,729.24)
29	Piutang Lainnya Netto	23,410,683,658.60	14,825,889,092.62
30	Belanja Dibayar Dimuka	225,359,310.00	569,084,398.00
31	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
32	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-
33	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
34	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
35	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
36	Persediaan	9,769,172,879.87	8,205,871,184.00
37	JUMLAH ASET LANCAR	52,824,458,983.84	36,743,697,840.84
38	INVESTASI JANGKA PANJANG		
39	Investasi Nonpermanen		
40	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
41	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
42	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
43	Dana Bergulir	392,373,200.00	392,373,200.00

NO	URAIAN	2018	2017
1	2	3	4
44	Deposito Jangka Panjang	-	-
45	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
46	Jumlah Investasi Nonpermanen	392,373,200.00	392,373,200.00
47	Investasi Permanen		
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21,620,198,212.68	19,905,702,364.84
49	Investasi Permanen Lainnya	-	-
50	Jumlah Investasi Permanen	21,620,198,212.68	19,905,702,364.84
51	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	22,012,571,412.68	20,298,075,564.84
52	ASET TETAP		
53	Tanah	572,730,324,080.00	576,872,194,591.00
54	Peralatan dan Mesin	325,699,524,149.91	289,362,942,702.42
55	Gedung dan Bangunan	700,924,289,784.10	664,241,961,279.01
56	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,398,922,339,639.00	1,311,499,206,739.00
57	Aset Tetap Lainnya	24,769,180,554.60	21,987,313,926.00
58	Konstruksi dalam Pengerjaan	848,945,000.00	2,708,545,000.00
59	Akumulasi Penyusutan	(938,518,369,645.19)	(686,040,131,993.44)
60	JUMLAH ASET TETAP	2,085,376,233,562.42	2,180,632,032,243.99
61	DANA CADANGAN		
62	Dana Cadangan	-	-
63	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
64	ASET LAINNYA		
65	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
66	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
67	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10,096,440,474.00	10,230,360,474.00
68	Aset Tak Berwujud	4,320,164,025.00	4,292,164,025.00
69	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3,574,492,025.00)	(3,051,908,425.00)
70	Aset Tak Berwujud Netto	745,672,000.00	1,240,255,600.00
71	Aset Lain-lain	26,568,323,438.00	55,869,204,389.00
72	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(14,546,889,059.00)	(8,799,432,172.00)
73	Aset Lain-lain Netto	12,021,434,379.00	47,069,772,217.00
74	JUMLAH ASET LAINNYA	22,863,546,853.00	58,540,388,291.00
75	JUMLAH ASET	2,183,076,810,811.94	2,296,214,193,940.67
76	KEWAJIBAN		
77	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
78	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1,636,363.00	11,541,784.00
79	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-	84,168,000.00
80	Utang Bunga	-	-
81	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
82	Pendapatan Diterima Dimuka	172,989,343.50	238,481,875.00
83	Utang Belanja	77,471,309,220.00	74,055,037,863.00
84	Utang Jangka Pendek Lainnya	25,943,949,749.00	19,622,941,676.00
85	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	103,589,884,675.50	94,012,171,198.00
86	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
87	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-
88	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-
89	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-
90	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
91	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
92	JUMLAH KEWAJIBAN	103,589,884,675.50	94,012,171,198.00
93	EKUITAS		

NO	URAIAN	2018	2017
1	2	3	4
94	EKUITAS DANA LANCAR	-	-
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	-
96	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-
97	Cadangan Piutang	-	-
98	Cadangan Persediaan	-	-
99	Cadangan Belanja yang ditangguhkan	-	-
100	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran	-	-
101	Utang Jangka Pendek	-	-
102	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	-	-
103	EKUITAS DANA INVENTASI	-	-
104	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-
105	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-
106	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-
107	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Lainnya	-	-
108	Utang Jangka Panjang	-	-
109	JUMLAH EKUITAS DANA INVENTASI	-	-
110	EKUITAS DANA CADANGAN	-	-
111	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-
112	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	-	-
113	Ekuitas	2,079,486,926,136.44	2,202,202,022,742.67
114	JUMLAH EKUITAS	2,079,486,926,136.44	2,202,202,022,742.67
115	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,183,076,810,811.94	2,296,214,193,940.67

Bantaeng, 24 Mei 2019

Bupati Bantaeng,

ILHAM SYAH AZIKIN

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	NILAI 2018	NILAI 2017
1	2	3	4
010	EKUITAS AWAL	2,202,202,022,742.67	1,840,548,397,719.20
020	SURPLUS/DEFISIT-LO	(51,595,724,586.78)	48,351,733,768.75
030	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	-	-
040	Koreksi Nilai Persediaan	19,713,688,767.00	(4,252,830,635.00)
045	Koreksi Aset Tetap	(5,332,237,971.01)	(5,651,232,990.00)
050	Koreksi Piutang	(56,970,971.86)	500,853,274.00
055	Koreksi Penyisihan Piutang	177,521,132.62	41,147,474.53
060	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	(25,349,034,688.72)	360,221,828.97
065	Koreksi Aset Lainnya	(37,948,028,548.00)	1,904,200,000.00
070	Koreksi Pinjaman Modal	-	-
075	Koreksi Investasi	(1,933,138,142.84)	582,215,802.00
080	Koreksi Hutang	10,972,546,734.00	(44,597,740,357.79)
085	Koreksi Pendapatan	166,430,161.51	208,559,909.00
090	Koreksi Amortisasi	-	-
095	Koreksi Asuransi	-	-
100	Mutasi Keluar/Masuk Aset Tetap	(41,219,478,999.81)	372,812,516,161.01
105	Koreksi pengembalian sisa kas	(328,996,204.34)	(572,000.00)
110	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	10,018,326,712.00	(8,605,447,212.00)
115	Tanah dibawah jalan/ruang milik jalan	-	-
190	EKUITAS AKHIR	2,079,486,926,136.44	2,202,202,022,742.67

Bantaeng, 24 Mei 2019

Bupati Bantaeng,

ILHAM SYAH AZIKIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	NILAI 2018	NILAI 2017
1	2	3	4
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	11,612,685,829.00	10,182,544,016.00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5,280,390,045.00	5,779,292,763.00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,790,269,590.00	5,964,250,856.52
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	72,430,406,743.18	42,280,428,748.12
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	10,273,180,777.00	14,214,269,983.00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4,343,619,422.00	3,872,046,909.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	494,749,832,000.00	493,079,256,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	215,529,019,670.00	135,348,038,100.00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	47,832,248,000.00	115,898,204,940.00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30,233,425,360.00	33,853,025,220.00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	9,179,021,124.00	2,024,101,200.00
15	Penerimaan Hibah	25,241,640,000.00	26,993,830,770.00
16	Penerimaan Dana Darurat	-	-
17	Penerimaan Lainnya	13,000,000.00	5,497,306,126.00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
19	JUMLAH ARUS MASUK KAS	931,508,738,560.18	894,986,595,631.64
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	335,615,021,251.00	303,338,457,675.00
22	Pembayaran Barang	246,870,662,024.20	276,003,063,031.00
23	Pembayaran Bunga	-	16,614,719.14
24	Pembayaran Subsidi	-	-
25	Pembayaran Hibah	46,599,001,595.00	18,476,650,850.00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	580,000,000.00	300,000,000.00
27	Pembayaran Tak Terduga	176,283,700.00	239,018,546.00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	403,764,650.00	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	254,449,215.00	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
31	Pembayaran Bantuan Keuangan	91,057,493,200.00	66,871,560,000.00
32	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	721,556,675,635.20	665,245,364,821.14
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	209,952,062,924.98	229,741,230,810.50
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	-	-
37	Penjualan atas Tanah	-	-
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	516,962,500.00	995,976,400.00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
42	Penjualan Aset Lainnya	-	-
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
45	JUMLAH ARUS MASUK KAS	516,962,500.00	995,976,400.00
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
48	Perolehan Tanah	361,418,280.00	3,811,464,760.00
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	46,570,877,126.00	35,792,659,061.00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	50,680,910,305.00	82,192,395,644.00
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	108,777,777,295.00	102,845,757,500.00
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	671,894,100.00	4,904,824,359.00
53	Perolehan Aset Lainnya	-	-
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-

NO	URAIAN	NILAI 2018	NILAI 2017
1	2	3	4
56	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	210,062,877,106.00	231,547,101,324.00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(209,545,914,606.00)	(230,551,124,924.00)
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
68	Penerimaan Sisa Kas Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-
69	JUMLAH ARUS MASUK KAS	-	-
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	177,130,582.41
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
80	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	-	177,130,582.41
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	(177,130,582.41)
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	45,950,418,889.00	48,420,821,179.00
85	Jumlah Arus Masuk Kas	45,950,418,889.00	48,420,821,179.00
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	45,960,324,310.00	48,916,778,300.22
88	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	45,960,324,310.00	48,916,778,300.22
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	(9,905,421.00)	(495,957,121.22)
90	Kenaikan/Penurunan Kas	396,242,897.98	(1,482,981,817.13)
91	Saldo Awal Kas	2,120,498,627.68	3,603,480,444.81
92	Saldo Akhir Kas	2,516,741,525.66	2,120,498,627.68
93	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
94	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	1,310,064,440.80	1,658,919,975.72
95	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	244,490,171.00	91,577,820.00
96	Saldo Akhir Bendahara BOS	97,435,408.00	108,213,778.00
97	Saldo Akhir Bendahara Kapitasi	612,279,331.03	52,049,386.96
98	Saldo Akhir kas BLUD	164,086,170.00	209,737,667.00
99	Saldo Akhir Kas	2,428,355,520.83	2,120,498,627.68

Bantaeng, 24 Mei 2019

Bupati Bantaeng,

ILHAM SYAH AZIKIN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAEN
KAS BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Nama SKPD	Uraian	Tahun	Saldo Kas Per-2017	Saldo Kas 2018	Pelunasan Tahun 2018	Saldo Kas Per 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Dinas PPKAD	Pajak PBB P2 2017	2017	8.738.248,00		8.738.248,00	-
b	Sekretariat Daerah	Retribusi Tempat Penginapan (Sewa Wisma Bonthain di Jakarta)	2016	9.499.572,00		9.499.572,00	-
		Retribusi Tempat Penginapan (Sewa Wisma Bonthain di Jakarta)	2017	72.890.000,00		72.890.000,00	-
c	Dinas Koperasi dan UKM	Retribusi Pasar Sentral Bantaeng	2017	450.000,00		450.000,00	-
			J u m l a h	91.577.820,00		91.577.820,00	-
a	Dinas Pertanian	Penjualan Hasil Usaha Daerah	2018		103.424.800,00		103.424.800,00
		penjualan Hewan Ternak pad UPTD peternakan	2018		3.049.000,00		3.049.000,00
b	Badan Pengelola Keuangan Daerah	PBB-P2	2018		123.700.321,00		123.700.321,00
c	Sekretariat Daerah	Sewa Wisma Bonthain di Jakarta	2018		161.050,00		161.050,00
d	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2018		14.155.000,00		14.155.000,00
			J u m l a h	-	244.490.171,00	-	244.490.171,00
Jumlah Kas Bendahara Penerimaan Per 31 Des 2018				91.577.820,00	244.490.171,00	91.577.820,00	244.490.171,00

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAEN
KAS BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Nama SKPD	Tahun	Saldo Kas					Saldo Kas Per-2017	Saldo Kas 2018	Pelunasan 2018	Saldo Kas Per 31 Desember 2018
			Kas UP/TU/GU	Pajak PPn	Pajak PPh. 21	Pajak PPh. 22	Pajak PPh. 23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2017	55.645.000,00					55.645.000,00		55.645.000,00	-
2	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan	2017		45.455,00	3.247.500,00	99.091,00		3.392.046,00		3.392.046,00	-
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2017	923,00					923,00		923,00	-
4	Dinas Ketahanan Pangan	2017		3.509.086,00	1.831.363,00	526.358,00		5.866.807,00		5.866.807,00	-
5	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2017	841.349,00					841.349,00		841.349,00	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	2017	4.337.350,00					4.337.350,00		4.337.350,00	-
7	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2017	1.290.600,00					1.290.600,00		1.290.600,00	-
8	Dinas Perikanan Dan Kelautan	2017		615.909,00			555.686,00	1.171.595,00		1.171.595,00	-
9	Inspektorat Daerah	2017	6.403.245,00	135.336,00	720.000,00		256.000,00	7.514.581,00		7.514.581,00	-
10	Kecamatan Eremerasa	2017	64.725,00					64.725,00		64.725,00	-
11	Kecamatan Sinoa	2017	2.250,00					2.250,00		2.250,00	-
12	Kecamatan Gantarangeke	2017	721.900,00					721.900,00		721.900,00	-
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2017	2.500,00					2.500,00		2.500,00	-
14	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2017						(0,49)		(0,49)	-
Jumlah			69.309.842,00	4.305.786,00	5.798.863,00	625.449,00	811.686,00	80.851.625,51	-	80.851.625,51	-
1	Dinas Pertanian	2018	600,00						600,00		600,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	2018	1,00						1,00		1,00
3	Dinas Kominfo	2018		1.636.363,00					1.636.363,00		1.636.363,00
Jumlah			601,00	1.636.363,00	-	-	-	-	1.636.964,00	-	1.636.964,00
Jumlah Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018			69.310.443,00	5.942.149,00	5.798.863,00	625.449,00	811.686,00	80.851.625,51	1.636.964,00	80.851.625,51	1.636.964,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jalan A. Mannappiang No. 5 Telp. (0413)- 21480 Bantaeng

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 900/229/ BPKD/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng bahwa ;

Nama : DEWI RATNASARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Bantaeng, 26 Maret 1997
NIM : 105730518915
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Beloparang, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian pada Bulan Juni s/d Juli 2019 dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "*Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng*"

Demikian surat keterangan ini kami buat atas dasar yang sebenarnya, diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bantaeng, 3 Juli 2019

An. KEPALA BPKD
SEKRETARIS

Ub. Kasubag. Umum dan Kepegawaian



[Handwritten Signature]
Hj. MUTAHHARA, S.Sos, MM
NIP. 19670816/198608 2 001

BIOGRAFI PENULIS



DEWI RATNASARI, Lahir pada tanggal 26 Maret 1997 di Bantaeng. Anak ketiga dari lima bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Rajuddin dan Hasmawati. Peneliti sekarang tinggal di Beloparang Kecamatan Bissappu Kelurahan Bonto Lebang, Kabupaten Bantaeng. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 22 Beloparang lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bissappu dan lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 1 Bantaeng lulus tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjadi mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi.